Takmir Masjid dan Otoritas Keagamaan di Pekanbaru

**Arya Arwanda1**

1Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: [aryaarwanda85@gmail.com](mailto:aryaarwanda85@gmail.com)

***Abstract:***

*This paper analyzes the massive shift and transformation of the power of mosque takmir who were initiated as individuals who have religious authority, especially as religious leaders and figures among mosques in the city of Pekanbaru and are able to give their best role in the public space as mosque takmir. This article will also show how the efforts made by the mosque takmir in shaping the congregation's and community's trust in him have the potential to adopt pious practices. In addition, this article will show the progressivity of takmir mosques in Pekanbaru, which are played by many students in general in social interactions with congregations and the community. This religious authority also shows that the takmir of mosques in the city of Pekanbaru is not someone who dares to go to extremes in controlling authority in an authoritarian manner. Through interviews and previous literary sources as well as the author's cognitive self-examination as takmir of the mosque, this article shows that the form of authority played can be summed up in the substance of the problem as follows; first, takmir mosque in Pekanbaru as an expansion of religious authority. Second, the feasibility of the congregation's credibility to takmir as a practice of piety. Third, Takmir mosque is not part of the struggle for religious authority. Apart from these problems, of course, all of this is the turmoil and dynamics of religious authority in Islamic law which must be played well by the takmir of mosques in Pekanbaru in particular.*

***Keywords:*** *The Role of Mosque Takmir, Religious Authority and Credibility.*

**Abstrak:**

Tulisan ini menganalis pergeseran secara masif tranformasi kekuasaan Takmir masjid yang diinisiasi sebagai individual yang memiliki otoritas keagamaan, terutama sebagai tokoh dan figur agama, termasuk para pengurus masjid di kota Pekanbaru yang mampu memberikan peran terbaiknya di ruang publik sebagai takmir masjid. Artikel ini juga menampilkan bagaimana usaha yang dilakukan takmir masjid dalam mengkontruksi kepercayaan jamaah dan masyarakat terhadap dirinya yang berpotensi dalam mengadopsi praktek kesalehan. Selain itu artikel ini menunjukkan progesivitas takmir masjid di Pekanbaru yang banyak diperankan oleh pengurus dan mahasiswa pada umumnya dalam berinteraksi sosial kepada jamaah dan masyarakat. Otoritas keagamaan yang dimiliki pengurus dan penjaga masjid ini memperlihatkan bahwasannya takmir masjid yang ada dikota Pekanbaru bukanlah orang yang berani main ektrim dalam mengendalikan otoritas secara otoriter. Melalui wawancara dan sumber sumber literatur terdahulu serta kognitif penulis dalam menjalaanjak pribadi sebagai takmir masjid, artikel ini menunjukkan bahwa bentuk otoritas yang diperankan dapat disimpulkan dalam subtansi masalah sebagai berikut; pertama, takmir masjid di Pekanbaru sebagai ekkspansi otoritas keagamaan. Kedua, kelayakan kredibilitas jamaah kepada takmir sebagai praktek kesalehan. Ketiga, Takmir masjid bukan bagian dari perebutan otorits keagamaan. Terlepas dari masalah itu tentunya itu semua adalah gejolak dan dinamika otoritas keagamaan dalam hukum islam yang harus diperankan secara baik oleh para Takmir masjid di Pekanbaru Khusunya.

**Kata kunci**: Peran Takmir Masjid, Otoritas keagamaan dan Kredibilitas.

Pendahuluan

Gudrun menyebutkan bahwa otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim bukanlah topik baru. Sejak awal, banyak sarjana yang tertarik tentang hal ini. Topik tentang otoritas keagamaan tersebut, bahkan, masuk dalam wilayah agama, hukum, politik, dan masyarakat. Karena itu, diperlukan ketelibatan kolektif.[[1]](#footnote-1) Seriring dengan perkembangan zaman, otoritas keagamaan di masyarakat kini mengalami ekspansi. Pada awalnya otoritas keagamaan hanya dihubungkan dengan figur tertentu yang memang memiliki otoritas untuk mengatur sisi spiritualitas masyarakat, kini melebar kepada para tokoh agama yang memegang kepercayaan masyarakat sebagai takmir masjid. Ekspansi otoritas keagamaan ini juga merambah pada dunia pendidikan. Masduki dan Awaliyah menyebutkan bahwa bahwa otoritas keagamaan tradisional di Indonesia tidak serta merta dilemahkan oleh otoritas keagamaan baru yang bermunculan di berbagai media. Otoritas keagamaan tradisional dalam hal ini pesantren salaf, terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan keagamaan umat Islam Indonesia. Perkembangan tersebut dapat membuktikan bahwa otoritas keagamaan tradisional ikut berperan aktif dalam kontestasi otoritas, bukan hanya di ruang offline tetapi juga di ruang online dengan memanfaatkan media baru sebagai sarana pengembangan dakwah Islam.[[2]](#footnote-2)

Dalam hal otoritas keagamaan, takmir masjid bisa disebut juga sebagai pengurus yang memiliki keilmuan agama yang mendapatkan peluang mengurus masjid dan turut serta menuntun praktik keagamaan para jama’ah atau masyarakat di lingkungnnya. Namun, fenomena pda masyarakat muslim di Indonesia saat ini perkembangan otoritas keagamaan semakin terfragmentasi. Jika, otoritas agama berapa pada tokok agama atau seorang kyai dan kemudian dimanifestasikan khotbah,[[3]](#footnote-3) maka begitu halnya dengan takmir masjid, otoritas keagamaannya dimanifestasikan sebagai figur da’i, khatib, dan guru mengaji. Dengan demikian otoritas keagamaan tidak mejadi dominasi komunitas, kelompok, atau organisasi tertentu, tetapi juga bisa dimiliki individu terutama individu yang menjadi pengurus masjid.

Tulisan ini fokus pada bagaimana otoritas keagamaan yang dimiliki oleh pengurus atau takmir yang memiliki kekuasaan mendampingi praktik keagamaan jama’ah. Kekuasaan ini muncul karena amanah dan tugas yang diberikan oleh jama’ah dan masyarakat. Kekuasaan takmir masjid ini bisa menjadi peluang dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh da’i. Artinya, secara tidak lansung seorang takmir masjid berperan melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang da’i. Pertanyaannya, bagaimana keberadaan takmir masjid di Pekanbaru yang mendapatkan mandat dalam otoritas keagamaan sebagai muslim religius menampilkan peran?. Bagaimana pula takmir masjid membawakan otoritas dan memberikan efek serta pengaruhnya kepada masyarakat setempat khususnya pada jamaah masjid.

Kajian literatur

Terdapat beberapa kajian terkait dengan otorits keagamaan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosidi, Yasril Yazid dan Amril (2021) yang berjudul” Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota Provinsi di Indonesia: Kasus MUI (Indonesian Muslim Scholar Council) in Pekanbaru and Pontianak.” Dengan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa MUI Pontianak dan Pekanbaru mengalami fragmentasi otoritas keagamaan yang serupa karena agensi manusia. Anggota MUI Pontianak dan Pekanbaru mewakili ormas-ormas Islam di Indonesia memperjuangkan otoritas keagamaan ormas-ormas Islamnya, bukan mempersatukan otoritas keagamaan di MUI. Karena otoritas agama memiliki wasiat yang diinginkan, maka tak heran jika di luar MUI Pontianak dan Pekanbaru banyak tokoh muslim yang berjuang melestarikannya. Individu menantang otoritas keagamaan MUI Pontianak dan Pekanbaru. Beberapa dari mereka adalah pengkhotbah Muslim lokal/setempat. Mereka memperkuat dan melestarikan otoritas keagamaan mereka dengan mendakwahkan Islam, sehingga berkontribusi pada tumbuhnya fragmentasi MUI di dua kota tersebut.[[4]](#footnote-4)

*Kedua*, studi yang dilakukan oleh Bryan S. Turner (2007) yang berjudul “Religious Authority and the New Media.” Dalam studi ini Bryan S. Turner dan Kamaludeen Mohamed Nasir membahas tentang penyebaran pendidikan massa dan literasi bersama melalui komunikasi massa. Cara ini menghasilkan sistematisasi pemikiran Islam melalui media pamflet agama, buku nasihat, panduan pribadi sehingga religiusitas seseorang dipahami secara sadar dan refleksif. Sistematisasi pemikiran Islam ini sering terjadi dalam otoritas keagamaan tradisional. Selain itu, pertumbuhan literasi dan munculnya pasar massal global untuk teks teks keagamaan telah memperluas akses awam ke teks teks cetak dan situs-situs keagamaan. Kemudian persaingan antara ulama tradisional, cendekiawan baru, dan negara untuk menguasai ideologi agama kini juga dilakukan dalam berbagai bahasa daerah. Sementara bahasa Arab masih mempertahankan otoritas ortodoksnya, massa Islam sering menghadapi agama dalam bahasa asli mereka untuk pertama kalinya. Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar dalam hal populasi, perubahan pendidikan dan intelektual ini juga menyiratkan bahwa Islam Asia Tenggara mungkin memainkan peran yang semakin penting dalam Islam global.[[5]](#footnote-5) Singkatnya adalah media baru terus bertraansformasi dalam berperan sebagai wadah dan sumber peluang otoritas keagaamaan yang mampu mmemberikan ideologi ideologi dan pemikiran melalui media massa, tentu ada kaitannya dengan penelitisn ysng penulis teliti yakni kesamaan dalam melihat pefroma otoritas dan bedanya pada sandingannya, peneliti menyandingkan dengan pern takmir yang mengemban otoritas keaagmaan saat ini.

*Ketiga*, studi yang dilakukan oleh Rumadi (2012) yang berjudul “Islam dan otoritas keagamaan”. Dalam studinya Rumadi mempertanyakan mungkinkah agama tumbuh tanpa otoritas? Rumadi lebih lanjut menjelaskan dua jawaban yang dapat menjadi pilihan yakni ”agama dapat tumbuh tanpa otoritas” atau “agama tidak dapat tumbuh tanpa otoritas”, Pandangan pertama didasarkan pada argumentasi bahwa agama merupakan pemahaman total terhadap ketuhanan. Yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah ketundukan terhadap Tuhan semata. Sementara pandangan kedua didasarkan atas argumentasi bahwa agama merupakan hak individual untuk berkomunikasi dan menyerahkan diri kepada Tuhan, namun di dalam lingkup sosial perkembangan agama membutuhkan “penyebar” yang memiliki kredibilitas untuk berbicara dan menyampaikan pesan pesan agama. Namun demikian, dalam kenyataannya otoritas agama bukan merupakan hal yang statis, namun dinamis. Tingkat otoritas keagamaan dan interrelasi antar tingkat tingkat otoritas merupakan bagian dari dinamika tersebut.[[6]](#footnote-6) Memang pada dasarnya konteks otoritas sangatlah luas dan ruang lingkupnya selalu mengalami perluasan dengan relevansinya zaman.

*Keempat*, penelkitian yang dilakukan oleh Ahmad Najib Burhani (2016) yang berjudul “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, fragmentasi otoritas keagamaan ini telah terjadi sebelum Aksi Bela Islam. Namun peta itu menjadi semakin terang paska aksi. Meski masih berperan signifikan, NU dan Muhammadiyah bukan lagi pemegang otoritas tunggal dalam persoalan agama di Indonesia. Kedua, fragmentasi ini terutama didukung oleh sosial media. Ketiga, keberhasilan Aksi Bela Islam itu terutama karena kemampuannya mentransformasikan konservatisme menjadi pop culture serta kemampuannya mempergunakan psikologi keagamaan dan ketakutan umat Islam terhadap ancaman kelompok yang berbeda.[[7]](#footnote-7) Setiap perkembangan adalah tantangan dan juga peluang bagi islam menampilkan otoritasnya di ruang publik.

*Kelima*, studi yang dilakukan Mohammad Zaki Arrobi, Amsa Nadzifah (2020) yang berjudul “Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?”. Dalam studi ini Arrobi dan Nadzifah menjelaskan tentang pandangan, sikap, dan peran otoritas keagamaan Islam dalam merespons situasi pandemi akibat penyebaran virus korona di Indonesia. Fokus artikel ini adalah artikulasi wacana keagamaan dan praksis sosial yang dilakukan oleh ‘ustad selebritis’ dan organisasi massa Islam dalam menghadapi pandemi akibat Covid-19. Tulisan ini mengulas pergeseran wacana di kalangan otoritas keagamaan menyangkut isu Covid-19. Di saat wabah korona belum terdeteksi di Indonesia yakni di bulan Januari-Februari, respons otoritas agama mengalami fragmentasi dan kontestasi agama. Fragmentasi ini ditunjukkan dengan adanya gap antara sikap pro aktif dan konstruktif mayoritas pemuka dan organisasi agama dengan sikap reaktif dan kontra produktif sebagian kecil pemuka agama lainnya. Lambat laun, seiring dengan kasus Covid-19 yang kian menyebar di tanah air, otoritas agama baru berupa ‘ustad selebritis’ maupun otoritas agama lama seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU mengalami konvergensi wacana dan praksis keagamaan dalam merespons Covid-19. Mereka sama-sama bekerja keras meyakinkan umat Islam bahwa pesan otoritas agama selaras dengan panduan otoritas kesehatan.[[8]](#footnote-8) Berbeda dengan fokus kajian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis fokus kepada peran takmir yang mampu mengekspansi otoritas keagamaan sebagai individual yang islami.

Keenam, kajian yang dilakukan oleh Aflahal Misbah (2019) yang berjudul “Kesenangan dan otoritas keaagamaan: sosialisasi anti-musik di instaagram”. Dalan studinya, Alfahal baranggapan bahwa perdebatan tentang kesenangan merupakan isu lama dalam masyarakat Muslim yang masih populer hingga sekarang. Perdebatan ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kelompok-kelompok Muslim seperti Salafi yang menyebarkan paham penentangan terhadap beragam bentuk dan praktik kesenangan. Berangkat dari pandangan Asef Bayat bahwa sosialisasi anti-kesenangan berkaitan erat dengan preservasi kuasa, tulisan ini memfokuskan perhatian pada reaksi masyarakat Muslim Indonesia terhadap sosialisasi anti-musik di media sosial Instagram oleh Salafi. Dari tagar #musikharam dan #hukummusik, perhatian kemudian diarahkan pada sosialisasi antimusik yang dilakukan oleh tiga akun utama, yaitu, @kajianislam, @ikhwan\_kendari, dan @daeng\_indonesia. Karakter dan pola sosialisasi khas yang ditunjukkan oleh masing-masing akun menghasilkan pemahaman yang beragam terhadap pola reaksi yang muncul. Permintaan argumen, musik Islami, dan sejarah dakwah Walisongo, adalah tiga dari pola umum yang bisa dipahami dari semua respons yang ada. Dari ketiga pola reaksi tersebut, penulis berargumen bahwa sosialisasi anti-kesenangan bukan semata berkaitan erat dengan preservasi kuasa, melainkan juga berpotensi melemahkan otoritas yang mensosialisasikan itu sendiri, terutama bagi otoritas keagamaan dari figur-figur Salafi.[[9]](#footnote-9) Dan ini juga ad relevaansinya terhadap peran takmir dalam membawa amanah yaang di automatik kan sebagai otoritas keaagamaan di daerah sekitaran masjid itu sendiri.

Berbeda dengan penelitian selanjutnya, artikel ini lebih menekankan pada bagaimana perkembangaan dan perluasan otoritas keagamaan melalui takmir masjid dimana pembahasan p semacam ini belum dilakukan oleh para ahli yang lain. Penulis memperkuat distinsi dengan menyoioal ekspresi peforma takmir masjid khusunya yang diakui sebagai figur atau tokoh agama yang andil dalam menyelesaikan persoalaan agama dan memberikan dedikasi prihal agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena dan perkembangan otoritas keagamaan yang diangkat dalam penelitian. Data diperoleh dari lapangan melalui wawancara berbasis hasil kerja etnografi dan netrografi. Terkait etnografi penulis berperan dalam wawancara via WhatsApp dan observasi partisipan dalam menjadi takmir Masjid di Pekanbaru.. Data dianalisis dengan cara………….. untuk memperoleh hasil dan kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

**Takmir Masjid di Pekanbaru: Ekspansi Otoritas Keagamaan**

Figur Takmir Masjid selalu diidentikkan dengan kesalehan religius di ruang publik. Figur seperti ini biasanya mencerminkan kemapanan agama sehingga sering diamanahkan masyarakat untuk menuntun mereka. Kondisi ini menggambarkan adanya korelasi antara kepribadian yang saleh dengan amanah dan posisi yang diberikan masyarakat. Cerminan figur seperti inilah yang terlihat pada seorang Takmir Masjid.

Chaniago menyebutkam bahwa Takmir Masjid adalah orang yang Pengurus atau takmir masjid adalah orang yang bertugas menjaga, mengurus, merawat masjid agar fungsi masjid dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Idealnya pengurus masjid harus seorang muslim yang memiliki kepribadian Islami dengan sejumlah ciri yang harus lekat pada dirinya, memiliki wawasan yang luas, baik menyangkut masalah keislaman, kemasjidan, kemasyarakatan maupun keorganisasian dan memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan masjid dengan segala aktivitasnya.

Figur Takmir Masjid memiliki posisi yang hampir setara dengan para da’i dan guru agama. Figur Takmir Masjid diyakini mampu mengajarkan nilai-nilai kesalehan kepada jama’ahnya bahkan masyarakat di lingkungannya. Uniknya di Pekanbaru, atas dasar temuan dan pengamatan, penulis melihat bahwa sebagian pengurus masjid justeru diamanahkan kepada figur yang belum tentu memiliki kemapanan keagamaan, namun memiliki kemampuan manajerial. Otorits keagamaan akhirnya berekspansi kepada para tokoh yang memiliki pengetahuan kegamaan melebihi dari pengurus masjid atau kepada para penjaga masjid.

Ekspansi otoritas keagamaan saat ini memang muncul dengan warna baru dalam praktik-praktik pengelolaan masjid. Takmir Masjid dipahami sebagai orang yang paham agama Islam dan mampu memenej masjid dengan baik serta memberikan teladan keagamaan bagi para jama’ahnya. Sayangnya, tidak pula semua masjid menjadikan indikator ini sebagai pertimbangan dalam menetapkan seseorang sebagaia pengelola masjid. Di lapangan orang yang diamanahkan sebagai penelola masjid lebih kenal dengan pengurus masjid. Sementara Takmir masjid lebih dipahami sebagai orang yang tidak sekeder mengolola masjid tetapi juga memberikan tuntunan keagamaan kepada para jama’ahnya. Oleh karena Takmir masjid mendapatkan amanah untuk mengelola atau mengurusi masjid, maka orotorits keagamaan menjadi peluang baginya. Artinya Takmir masjid bisa membawa jama’ahnya untuk mengikuti mazhab tertentu dalam praktik keagamaam. Otorits yang diperoleh takmir ini dapat diperluas sampai kepada hak menentukan kreteria da’i atau khatib yang memberikan khotbah atau ceramah kepada jama’ahnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Takmir Masjid adalah orang yang tinggal masjid menjalankan tugas nya yakni membersihkan perkarangan masjid baik di dalam dan di luar masjid serta mengurusi masjid baik itu pengelolaan dan pengembangan program program masjid yang akan dijalankan. Nah, Ekspansi itu hadir ketika adanya kredibilitaas jamaah kepada takmir masjid yang mampu berperan sebagai orang yang mampu memberikan solusi di berbagai persoalaan agama, pernyataan penulis ini di nyatakan secara masif ketika sudah mewawancarai saudara Aldi Taufiqi yang merupakan salah seorang takmir dan sekaligus imam di masjid Shiratul Jannah Jl. Gn. Papadayan No 47 kota Pekanbaru dan kebetulan beliau juga seorang Mahasiswa Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Manajemen Dakwah, penulis menanyakan mengenai ekspansi otoritas keagamaan oleh takmir masjid, saudara Aldi Taufiqi mengatakan bahwa:

*“Otoritas keagamaan memang semakin luas begitu juga dengan peradaban islam yang terus berkembang dan memberikan nilai kesalehan yang di artikulasikan kepada peran takmir masjid, sebgai takmir masji dan sekaligus imam dimasjid Shiratul Jannah ini saya juga memiliki otoritas keagmaan, hal itu dapat dilihat benyaknya para jamaah dan ibu ibu masyarakat setempat menanyakan agama kepada saya, apalagi saya dapat dikatakan sebagai imam tetap dimasjid itu, selnjutnya juga saya juga sebagai guru ngaji/ MDA yang ada di masjid ini. Eksplorasi yang saya tampilkan untuk memperoleh otoritas itu tak hanya dari mandat dan amanah yang diemban kan ke saya tapi saya memperoleh otoritas dari seseorang muslim yang memiliki kepribadiaan sebagai muslim yang religiulitas. Nah hal itu lah mengapa banyak cabang peran saya sebagai takmir dan sekaligus imam masjid ini, apa lagi ketika yasinan maka saya yang disuruh memimpin baaca yasin, kemudian ketika ada doa bersama saya juga di amanahkan dan dioercaya untuk memimpin doa, walaupun saya sering menolak lantaran adanya orang orang tua yang lebih agamis dan paham agama. Dari beberapa yang saya contohkan ini merupakan adanya ekspansi otoritas keagamaan yang dapat mewarnai islam saat ini.*

Untuk melihat bagaimana otoritas keagamaan itu ada peneliti mencoba melakukan wawancara kepada Asnawi salah satu takmir masjid Al-Jihad JL. Suka Karya gg. Kelapa kota Pekanbaru yang juga merupakan mahasiswa Manajemen Dakwah Di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau, saya menanyakan prihal peran dia sebagai takmir dalam otoritas keagamaan, Asnawi mengatakan *“iyaa benar, sebagai takmir masjid saya menggurusi masjid dan disamping mengurusi masjid saya merasakan bahwasannya ada secuil kekuasaan yang saya dapatkan dalam menjalankan tugas sebagai takmir, contoh kecilnya adanya masyarakat ataupun jamaah setempat yang menanyakan prihal agama dan diskusi ringan persoalaan agama. Kemudian dengan adanya amanah sebagai takmir masjid saya juga secara otomatis menjadi ustadz yang mengajarkan anak anak ngaji ketika ba,da maghrib, nah tentu hal juga saya seolah memiliki otoritas keagamaan dan bisa juga menjadi sarana dan wadah religiulitas”* mendengar jawaban dari saudara Asnawi tersebut saya tertarik unutk membahas topik ini, karna menurut peneliti bahwasannya ada nya perluasaan kekuasaaan dan transformasi agama melalui Takmir masjid dan juga hal ini tentu masih dalam konteks persoalaan agama yang terjadi dalam kehidupan sehari hari.

Takmir masjid adalah individual yang memiliki amanah untuk menjaga, mengurus, merawat masjid agar fungsi masjid dapat dimaksimalkan sebaik mungkin.[[10]](#footnote-10) Idealnya takmir masjid adalah seorang muslim yang memiliki kepribadian islami dan religiulitas dengan sejumlah ciri yang melekat pada dirinya seperti memahami ilmu agama dengan baik, menjaga shalat berjamaah di masjid, bersungguh sungguh dan bertanggung jawab serta kreatif.[[11]](#footnote-11) Kemudian juga memiliki kompetensi baik menyangkut masalah keislaman, kemasjidan, kemasyarakatan maupun keorganisasian dan memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan masjid dengan segala aktivitasnya.[[12]](#footnote-12) Disamping itu juga dinamika otoritas keagamaan terus bergejolak di segala lini kehidupan masyarakat muslim, namun yang terpenting daripada itu adaalah perluasaan bentuk otoritas keagamaan yang di perankan oleh Takmir masjid.

Dibagian ini juga penulis berargumen bahwa takmir masjid yang di perankan oleh seorang mahasiswa pada umumnya bisa menjadi arah bahwa amanah takmir itu membawa mahasiswa itu kepada idealis muslim. sambungan dari wawancara pemulis bersama Saudara Asnawi ia juga mengatakan:

*“Bertahun tahun saya menjadi takmir masjid, memang pada dasarnya kontrak/perjanjian kepada pihak masjid itu memang memiliki syarat dan ketentuan sebelum bekerja di situ, adapayn SOP pada masjid itu adalah Takmir masjid memang dituntun harus bisa menjadi protokol ketika ada pengajian dan kegiatankegiatan masjid, terkadang juga menjadi pembaca Al Quran(Qori), kemudian juga harus bisa khutbah menggantikan khatib yang berhalangan hadir saat jumaatan(jadi khatib tunggu), nah dengan sering nya saya menjadi khatib, qori, protokol dan berperan seolah menjadi ustadz ataupun orang yang paham agama.”*

Mendengar dari jawaban Saudara Asnawi itu saya menyimpulkan bahwasannya pada bagian ini, otoritas keagamaan lebih meluas dan semakin berbentuk dengan wajah dan ekspresi yang bermacam macam, dengan aktifnya takmir masjid dan keidealisan nya mampu menghadirkaan ekspansi otoritas keagamaan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja di masjid masjid kota Pekanbaru khusunya.

**Kelayakan Kredibilitas Jamaah Kepada Takmir Sebagai Praktek Kesalehan**

Secara umum kredibilitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan pengakuan seseorang terhadap sesuatu.[[13]](#footnote-13) Kelayakan itu hadir dikarenakan adanya pengakuan dan kepercayaan seseorang dapat dibentuk dan dibangun berdasarkan pendidikan, pengetahuan dan kharismatik/ wibawa.[[14]](#footnote-14) Identitas takmir masjid di implikasikan kepada prilaku dan adab yang dilakukannya kepada masyarakat setempat dan jamaah masjid itu sendiri. Hadirnya prihal kepercayaan takmir sebagai pribadi yang mempraktekkan kesalehan diakui secara masif setelah hasil wawancara penulis dengan saudara Fathul Haris yang juga merupakan Takmir Masjid dan sekaligus sebagai imam pengganti di masjid Al Ikhlas Perumahan Wisma Kualu Permai Jl. Taman Karya kota Pekanbaru sekaligus beliau juga seorang Mahasiswa Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Manajemen Dakwah, ia mengatakan bahwa:

*“Sebagai takmir masjid pastinya memiliki tanggung jawa yang mana sebelum amanah ini diberikan saya di tes melalui kemampuan saya mengaji, menjadi imam, prihal agama, latar belakang pendidikan, banyak nya hafalan Al Quran, kompetensi dalam berbicara di depan umum dan cara bersosialisasi kepada masyarakat setempat. Untuk melihat kelayakan kredibilitas itu saya mencoba serius dalam mempraktekkan kesalehan saya dalam berintraksi di kalangan masyarakat itu. Saya mencoba ikut andil dalam kegiatan yang ada di daerah setempat mengikuti acara acara yasinan dan doa doa selamatan serta tahlilan, nah kemudian dengan dengan seringnya saya bersosialisasi maka pengakuan otorits keagamaan dari masyarakat semakin masif, dan setelah itu saya sering di tunjuk untuk memimpim dan berperan ketika ada agenda keagamaan. Apalagi ketika jumatan saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi khatib dan sebagai imam sholat jumat. Sampai sampai saya juga diberi kelayakan menyampaikan khutbah id Adha, hal ini mengartikulasikan bahwa lambat laun seorang takmir yang bekerja di masjid dengan tempo waktu yang lama mampu memberikan kelayakan kredibilitas sebagai figur di masjid tersebut.”*

Pernyataan ini diperkuat penulis bahwa pengalaman kognitif didalam praktek keagamaan bisa memperoleh kelayakan yang berbentuk pengakuan masyarakat dan jamaah masjid. Tentunya hal itu didukung oleh kualitas dari takmir itu sendiri, kemudian juga ternyata dalam kelayakan kredibilitas untuk memperoleh otoritas ada tahapan dan proses sebagai alur dari bentuk dari keagagamaan itu sendiri.

**Takmir Masjid Bukan Bagian Dari Perebutan Otoritas keagamaan**

Pemikirian itu hadir dari adanya otoritas yang di orientasikan kepada kepentingan dan merujuk juga pada area kontestasi keagamaan yang berujung dengan perebutan otoritas di wajah islam saat ini. Senada dengan persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, menjadi arena kontestasi berbagai kelompok kelompok keagamaan. Dengan menggenggam otoritas, tidak jarang tindakan tindakan otoriter dipamerkan dengan menghakimi kelompok dan individual lain yang dianggap melenceng dari rel keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman “aliran sesat”, otoritas juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku dan psikologis pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan itu sendiri. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan yang sangat plural ini.[[15]](#footnote-15) Maka dari itu eksistensi dari takmir massjid yang menjadi bagian dari otoritas keagamaan juga harus berfikrah bahwa menjunjung persatuan adalah visi bersama dalam mengenggam otoritas agama.

Pada dasar nya Takmir Masjid juga bagisan dari otoritas keagamaan dan berpeluang mengencam tindakan yang nantinya mengkhawatirkan persoalaan religiulitas, takmir juga terlahir dari berbagai macam latarbelakang yang sekiranya berpotensi bertindak melenceng dengan contoh, memberikan pemahaman agama, ajaran, dan pemikiran kemapda jamaah dan masyarakat setempat, serta anak anak yang mengaji dengan Takmir masjid tersebut, hal ini disebab kan adanya otoriter dari kekuasaan yang telah di kredibilitas kan oleh masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, untuk memahami aspek teoritis persoalan otoritas keagamaan ini, para ilmuan hukum islam menjelaskan ada pembeda otoritas, ada dua jenis sifat otoritas, yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan dan potensi untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum. Otoritas jenis ini sifatnya memaksa orang lain agar tunduk pada pikiran dan kehendak yang di inginkan. Otoritas koersif ini biasanya terkait dengan kekuasaan politik dengan segala aparaturnya memiliki kekuatan untuk memaksa dan menghukum. Sedang otoritas persuasif merupakan kemampuan dan potensi untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Karena itu, otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Otoritas jenis ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, kharismatik dan mengajak melalui ideologi agama.[[16]](#footnote-16)

Jadi, setiap tradisi dan budaya berideologi agama mempunyai sumber sumber otoritas masing masing yang dirujuk untuk otenfisitas tradisi dan jalan agama. Islam memiliki sumber otoritasnya sendiri baik lisan maupun tulisan. Unik nya otoritas keagamaan ini identik dengan adanya lembaga, oraganisasi, komunitas dan badan badan yang memiliki pemahaman plural dalam menafsirkan nilai kesalehan, padahal secara konteks itu semua bisa dijadikan sebagai jamuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalaan agama. Hal ini juga jikau dibaca dari segi negatif nya maka dapat memicu terjadinya perebutan otoritas keagamaan. Situasi dan keadaan ini sering mengakibatkan terjadinya anomali dalam otoritas keagamaan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tertentu atas kehidupan keagamaan. Inilah yang perlu diantisipasi. Meskipun pada lini lain, terjadi pembukaan pintu ijtihad secara besar besaran.[[17]](#footnote-17)

Kemudian juga pada dasarnya persoalan otoritas keagamaan yang membuka peluang politisasi pemaknaan dan melahirkan otoritarianisme ini dapat dianalisis dari sudut pandang rasional yang bersifat normatif. Dengan kata lain, otoritas Tuhan dan manusia dan keterkaitan keduanya dapat dilihat dari perspektif yang murni bersifat rasional, logika dan filosofis. Premis premis rasional dapat didefinisikan dan kemudian dilanjutkan pembahasan dengan menempatkan kesadaran rasional dalam terang premis tersebut. Dari sudut normatif, kiranya dapat dinyatakan bahwa nilai nilai yang menjadi faktor penentu, seperti rasionalitas, keaadilan kesejahteraan dan nilai nilai pokok lainnya merupakan standar otoritatif yang harus menjadi dasar untuk membangun gagasan tentang otoritas dalam agama islam.

Dari persoalan dan permasalah otoritas agama, baik adanya perebutan dan posisi serta porsi otoritas itu sendiri, korelasi terhadap takmir adalah sebagai perluasan dan membantu yang dapat dikatakan signifikan dalam memberikan alternatif kesalehan. Dari cerminan perebutan otoritas keagamaan itu bahwa peran takmir yang dibahas dibagian atas ini melihatkan mahasiswa yang mengisi masjid dan menjadi takmir sekaligus imam masjid, mereka juga satu frekuensi dalam aliran dan kepahaman, jadi tidak menimbulkan perebutan secara ekstrem dan pasksaan namun berkembang meluaskan otoritas dalam konteks berkala.

Sekarang ini banyak terdata bahwa di Kota Pekanbaru banyak sekali masjid yang di isi mahasiswa mahasiswa dan mereka tinggal disana untuk bekerja mendapatkan uang dan tempat tinggal selama mereka kuliah. Secara konteks otoritas mereka tetap dianggap ada dan tidak di pisahkan dalam kelompok kelompok mana pun dalam menjalankan tugasnya sebagai takmir masjid. Otoritas takmir masjid juga bukan kalangan yang mampu memberikan pandangan antara sesuatu yang benar dan salah namun mereka memberikan pandangan secara rasional dan eksplisit. Walaupun fenomena otoritas keagamaan ini sering digaungkan dalam kontestasi agama, baik itu ide, gagasan dan pemikiran pemikiran namun itu merupakan hal yang lumrah dan menjadi dinamika hukum islam.

Berdasarkan dari semua hasil subtansi ini dapat di singgung bahwa eksistensi takmir masjid memang bukan faktor indikasi yang menjadikan adanya perpecahaan dan konflik baik itu dalam hukum islam maupun praktek kesalehan sehingga dapat memicu adanya perebutan otoritas keagamaan. Penulis mengnggap takmir masjid memang bukan lah individualis yang membuat perebutan itu kembali hadir namun jikalau sentimen itu pasti selalu ada dan hal itu merupakan hanyaa perspektif masyarakat, khusunya di kota Pekanbaru selama itu belum ada kasus yang membuktikan jikalau takmir masjid bersikeras dalam memegang sandaran amanah yang di sematkan sebagai otoritas keagamaan itu melenceng dari hal yang seharusyaa. Sesuai dengan temuan penulis dari hasil observasi wawancara dari sejumlah populasi yang berkaitan, memang takmir masjid berkerja dan dianggap memiliki otoritas keagamaan masih berjalan diatas tuntunan pihaak masjid (internal) dan masyarakat setempat (eksternal). Hal ini lah dapat penulis lihat danya keterbatasn otoritas keagamaan yang dimiliki oelh seorang takmir masjid di kota Pekanbaru.

**Simpulan**

Fenomena Takmir masjida dalam memiliki otoritas keagaamaan memang telah lama dibincang kan oleh para tokoh dan figur aagama, mereka beranggapan bahwasannya takmir masjid itu memang orang yang memiliki kemampuan dan kompeten dalam mengintegrasikan nilai kebaikan dalam praktek praktek keagamaa yang dilakukan selama menjadi takmir masjid. Kemudian artukel ini juga menunjukkan takmir masjid ini banyak diperankan oleh mahasiswa yang bekerja menjadi takmir masjid di kota Pekanbaru sebagai bentuk ekspansi otoritas keagamaan dalam pendistribusian teori agam diruang publik.

Lebih lanjut, artikel ini menunjukkan adanya kelayakan kredibilitas jamaah kepada Takmir masjid sebagai orang yang mempraktekan kesalehan di dalam berintraksi kepada jamaah masjid dan masyarakat setempat. Kemudian itu juga disandingkaan banyak nya mahasiwa yang menjadi takmir masjid di kota Pekanbaru ini, mereka mendapatkan kredibilitas dikarenakan sering menunjukkan performanya sebagai pribadi muslim yang religiulitas dalam mempraktekkan kesalehan dan disertanya dengan tampil dalam kegiatan, agenda agama, memimpin acara tahlilan, memimpin doa, menjadi khatib dan mengajar anak anak ngaji. Hal itu ;ah yang menjadi power takmir sehingga diterima dalam bentuk kredibilitas nya sebagai tokoh yang mampu memnahkodai otoritas keagamaan.

Terakhir, artikel ini mennampilkan pola keberadaan takmir masjid yang di inisiasi bukan untik merebut otoritas keagamaan. Posisi dan porsi dari otoritas yang miliki oleh takmir masjid adalah sebagai perluasan kekuasaan dan membantu masyarakat yang dapat dikatakan signifikan dalam memberikan alternatif kesalehan. Otoritas takmir masjid juga bukan kalangan yang mampu memberikan pernyataan antara sesuatu yang benar dan salah namun mereka memberikan pandangan secara rasional dan eksplisit mereka. Walaupun fenomena otoritas keagamaan ini sering digaungkan dalam kontestasi agama, baik itu ide, gagasan dan pemikiran pemikiran namun itu merupakan hal yang lumrah dan menjadi dinamika hukum islam. Namun, walaupun begitu takmir masjid yang ada di kota Pekanbaru memang bukan lah individualis yang membuat perebutan otoritas itu mereka kebanyakan hanya mahasiswa yang bekerja dan menumpang tinggal di masjid yang terkadang otomatis di jadikan sarana bertanya prihal agama dan sebagai contoh muslim religius dalam konteks sebagai pemegang otoritas keagamaan di kalangan masjid kota Pekanbaru.

**Referensi**

Arrobi, Mohammad Zaki, dan Amsa Nadzifah. “Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?” *MAARIF* 15, no. 1 (30 Juni 2020): 197–215. https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.85.

Bukhari, Bukhari. “Membangun Kompetensi dan Kredibilitas Da’i.” *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2014, 81–103.

Burhani, Ahmad Najib. “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan.” *Jurnal Maarif Institute* 11, no. 2 (2016): 15–29.

Caniago, Fauzi, dan Politeknik Piksi Ganesha. “Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berkurban Di Masyarakat.” *Jurnal Textura* 6 (2019).

Faizin, Hamam. “Berebut Otoritas Keagamaan.” *dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog*, no. 65 (2008).

Izzati, Hanik Asih. “Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam (Studi Di Masjid Al Muttaqiin Kalibening Tingkir Salatiga).” PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2015.

Misbah, Aflahal. “KESENANGAN DAN OTORITAS KEAGAMAAN: SOSIALISASI ANTI-MUSIK DI INSTAGRAM.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 2019, 149–68.

Rosidi, Imron, dan Yasril Yazid. “The Fragmentation of Religious Authority in Provincial Towns in Indonesia: The Case of the mui (Indonesian Muslim Scholar Council) in Pekanbaru and Pontianak.” *Manusya: Journal of Humanities* 24, no. 2 (2021): 185–203.

Rumadi, Rumadi. “Islam Dan Otoritas Keagamaan.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 25–54.

Turner, Bryan S. “Religious authority and the new media.” *Theory, culture & society* 24, no. 2 (2007): 117–34.

[[18]](#endnote-1)Hasil wawancara online peneliti dengan Sudara Asnawi Nasution, Mahasiswa UIN Suska, Jurusan Maanajemen Dakwah (Takmir Masjid yang ada di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2022, Via Whatshapp

Hasil wawancara online peneliti dengan Sudara Aldi Taufiqi, Mahasiswa UIN Suska, Jurusan Maanajemen Dakwah (Takmir Masjid yang ada di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2022, Via Whatshapp

Hasil wawancara online peneliti dengan Sudara Fathul Haris, Mahasiswa UIN Suska, Jurusan Maanajemen Dakwah (Takmir Masjid yang ada di Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2022, Via Whatshapp

Hasil Pengalaman dan Kognitif Penulis yang juga pernah menjadi Taakmir Masjid yang ada Di Pekanbaru dan menaruh kesimpulan sebagai data dalam artikel ini

1. Turner, B.S., & Nasir, K.M. (Eds.). (2013). The Sociology of Islam: Collected Essays of Bryan S. Turner (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315552668> [↑](#footnote-ref-1)
2. Awaliah, S., & Masduki, M. (2019). KONTESTASI DAN ADAPTASI OTORITAS KEAGAMAAN TRADISIONAL: MENCERMATI VISI DAKWAH PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA. Jurnal Dakwah Risalah, 30(1), 109-122. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v30i1.7453> [↑](#footnote-ref-2)
3. Imron Rosidi dan Yasril Yazid, “The Fragmentation of Religious Authority in Provincial Towns in Indonesia: The Case of the mui (Indonesian Muslim Scholar Council) in Pekanbaru and Pontianak,” *Manusya: Journal of Humanities* 24, no. 2 (2021): 185–203. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rosidi dan Yazid. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bryan S. Turner, “Religious authority and the new media,” *Theory, culture & society* 24, no. 2 (2007): 117–34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rumadi Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 25–54. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Najib Burhani, “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan,” *Jurnal Maarif Institute* 11, no. 2 (2016): 15–29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mohammad Zaki Arrobi dan Amsa Nadzifah, “Otoritas Agama di Era Korona: Dari Fragmentasi Ke Konvergensi?,” *MAARIF* 15, no. 1 (30 Juni 2020): 197–215, https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.85. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aflahal Misbah, “KESENANGAN DAN OTORITAS KEAGAMAAN: SOSIALISASI ANTI-MUSIK DI INSTAGRAM,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 2019, 149–68. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fauzi Caniago dan Politeknik Piksi Ganesha, “Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berkurban Di Masyarakat,” *Jurnal Textura* 6 (2019). [↑](#footnote-ref-10)
11. Hanik Asih Izzati, “Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam (Studi Di Masjid Al Muttaqiin Kalibening Tingkir Salatiga)” (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2015). [↑](#footnote-ref-11)
12. Caniago dan Ganesha, “Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berkurban Di Masyarakat.” [↑](#footnote-ref-12)
13. Bukhari Bukhari, “Membangun Kompetensi dan Kredibilitas Da’i,” *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2014, 81–103. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bukhari. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan.” [↑](#footnote-ref-15)
16. Rumadi. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hamam Faizin, “Berebut Otoritas Keagamaan,” *dalam Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Dialog*, no. 65 (2008). [↑](#footnote-ref-17)
18. Chaniago halaman 76 [↑](#endnote-ref-1)